

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat maturitas *e-government* pemerintah daerah kota dan kabupaten di Pulau Sumatera tergolong rendah dimana tingkat tertinggi yang dapat dicapai hanya tingkat 2 dari maksimal 4 oleh 25 pemerintah daerah. Jumlah indikator tertinggi yang dapat dipenuhi adalah sebesar 8 indikator oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara itu, jumlah indikator terendah dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 4 indikator. Tingkat yang masih rendah ini terjadi karena kurang maksimalnya beberapa aspek seperti aspek teknologi, data, pemerintahan dan regulasi.
2. Dari tiga tahapan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dievaluasi, tahap pertanggungjawaban memiliki tingkat transparansi tertinggi atau penyediaan informasi terbanyak yaitu dengan skor rata-rata sebesar 3.12. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan berbasis web pemerintah daerah di Pulau Sumatera pada tahun anggaran 2019 termasuk ke dalam kategori rendah dimana semua pemerintah daerah termasuk ke dalam kategori tidak cukup (*insufficient*). Sebanyak 32 dari 35 pemerintah daerah termasuk ke kategori tidak cukup (*insufficient*) 1 dengan skor 0-20% yaitu kategori sedikit (*scant or none*), sedangkan 3 sisanya termasuk ke dalam kategori tidak cukup (*insufficient*) 2 dengan skor 21-40% yaitu kategori minimal (*minimal*). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut masih menganggap informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai hal yang bersifat rahasia dan tertutup dari masyarakat.
3. Maturitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji t, nilai signifikansi t maturitas cukup tinggi, yaitu 0.019. Nilai yang lebih kecil dari 0,05 ini mengindikasikan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan oleh maturitas terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini diketahui melalui hasil uji nilai signifikansi t transparansi yang kecil dari 005, yaitu sebesar 0,004.

5.2. Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki banyak keterbatasan dalam menjalankan penelitian. Diantaranya adalah:

1. Banyak pemerintah daerah yang tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel sehingga hanya sedikit sampel yang didapatkan.
2. Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan awal Juni yang mana harusnya dilakukan pada bulan di akhir tahun seperti September sampai dengan Desember karena pada saat tersebut banyak pemerintah daerah melaporkan laporan keuangan yang lebih baru, sehingga gap waktu dalam penelitian hanya 1 tahun dan bukan 2 tahun.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, maka beberapa saran yang diberikan oleh peneliti adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lakukan penelitian dari jauh hari dan pada bulan-bulan di akhir tahun sehingga peneliti dapat melakukan permohonan berkas LKPD Kabupaten/kota pada PPID BPK Provinsi sehingga dapat memperoleh sampel yang lebih banyak dengan laporan keuangan yang lebih baru.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah variabel agar hasil penelitian ini dapat menjadi lebih baik lagi.
3. Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk meningkatkan maturitas *e-government* agar lebih interaktif lagi sehingga masyarakat lebih berpartisipasi di dalam pemerintahan karena tingkat maturitas yang terlalu rendah, dimana hanya mencapai maksimum 8 indikator dari total 17 indikator.

4. Bagi pemerintah daerah, sebaiknya lakukan publikasi informasi maupun dokumen pengelolaan keuangan daerah pada setiap tahap-tahap penyusunan anggaran agar masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaan keuangan daerah karena tingkat transparansi yang terlalu rendah dari skor maksimum yang diharapkan.

5.4. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian-bagian sebelumnya, diketahui implikasi yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi tingkat maturitas pemerintahan elektronik dengan basis web serta tingkat transparansi pengelolaan keuangan berbasis webnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya mengevaluasi serta meningkatkan maturitas pemerintahan elektronik dan transparansi pengelolaan keuangan berbasis webnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan mengenai peningkatan kinerjanya.

